KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Ada potensi cuaca ekstrem: BMKG bisa modifikasi cuasa
**Tanggal** : Kamis, 04 Desember 2025
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

## Ada Potensi Cuaca Ekstrem

# BMKG Bisa Modifikasi Cuaca

**Senayan mengingatkan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Tanah Air. Untuk itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta untuk tidak ragu memodifikasi cuaca di daerah-daerah yang teridentifikasi sangat rawan bencana.**


SUMBER: WEB FRAKSI PKS

Abdul Hadi

ANGGOTA Komisi V DPR Abdul Hadi menjelaskan, data BMKG menunjukkan potensi pertumbuhan bibit siklon maupun siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga Papua. Dampaknya diprediksi menjangkau Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, NTB, dan NTT dengan fenomena angin kencang serta gelombang tinggi.

"BMKG jangan ragu melakukan operasi modifikasi cuaca di daerah-daerah yang sangat rawan bencana. Langkah ini sangat penting sebagai upaya antisipatif," kata Abdul Hadi dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Menurut politikus PKS itu, langkah tersebut adalah mitigasi efektif. Karena lebih baik keluar biaya untuk modifikasi cuaca di awal, daripada kita harus menanggung kerugian materi infrastruktur. Dan juga, dampak sosial yang jauh lebih besar akibat banjir atau longsor yang tidak terkendali.

Selanjutnya, legislator asal Lombok, NTB itu juga meminta masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir di daerah asalnya untuk mematuhi peringatan dini. Aktifkan Posko Siaga Bencana dan terus memantau info dari BMKG. "Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita tutup tahun 2025 ini dengan ikhtiar maksimal agar terhindar dari musibah," katanya.

Selain itu, dia juga meminta Pemda bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, mulai dari pompa air, drainase, hingga tanggul sungai dan pantai. Tak lupa, kesiapan mitigasi lapangan, termasuk pemangkasan pohon rawan tumbang serta kesiapsiagaan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jadi hal krusial.

"Dari informasi BMKG itu, saya meminta Pemda, secara khusus NTB, untuk tidak lengah. Kita harus bergerak lebih awal sebelum bencana terjadi," tegasnya.

Ketua Komisi V Lasarus menambahkan, berdasarkan audit Badan Pemerikaa Keuangan (BPK), fungsi pelayanan informasi publik BMKG belum berjalan optimal. Dalam audit itu, penyampaian informasi peringatan dini belum efektif. "Pemanfaatan sistem hidrometeorologi untuk pencegahan banjir, kekeringan, dan longsor masih jauh dari maksimal," ujar Lasarus.

Dampak buruknya, kata Lasarus, potensi bencana semakin besar. Padahal, kinerja BMKG berkaitan erat dengan sektor vital seperti pertanian dan keselamatan publik. Dia menegaskan, komisinya akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja BMKG secara serius.

"Kita sangat butuh informasi terbaru yang mendukung kekuatan ketahanan pangan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Jadi, tanggung jawab BMKG ini besar," ucap anggota Fraksi PDIP itu.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas peringatan dini, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. BMKG terus melaporkan perkembangan analisis cuaca ekstrem dan potensi siklon tropis yang berdampak.

"Rilis peringatan dini telah diterbitkan empat hingga delapan hari sebelum kejadian, dan koordinasi diperkuat melalui Balai Besar MKG Wilayah I bersama Pemda serta Forkopimda," terang Faisal.

BMKG, sambungnya, juga melakukan langkah mitigasi tambahan. Termasuk peningkatan kesiapsiagaan daerah dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah terdampak. "Intinya, kewaspadaan harus ditingkatkan pada periode Desember hingga Februari ini," tandasnya. ■ PYB